

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Timur Tengah merupakan negara yang rawan terjadinya konflik politik dan keamanan. Konflik ini terjadi bukan hanya dalam dimensi konflik internal negara namun juga konflik antar-negara, baik sesama negara Arab, ataupun keterlibatan negara non-Arab. Berbagai konflik yang terjadi diiringi dengan resolusi konflik yang minim, sehingga tidak hanya berpengaruh terhadap citra kawasan ini sebagai wilayah konflik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan internasional.<sup>1</sup>

Pada penghujung 2010 hingga 2011, kawasan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan fenomena *The Arab Spring*.<sup>2</sup> Fenomena ini berupa pemberontakan yang dilakukan masyarakat untuk menentang pemerintahan otoriter agar menjadi pemerintahan yang demokratis dan menyebabkan beberapa negara di MENA (*Middle East and North Africa*) mengalami masa transisi ekonomi dan politik sehingga membentuk lingkungan strategis baru. Hal ini juga mengekspos negara GCC (*Gulf Cooperation Council*) atau negara teluk sebagai negara yang belum mengalami transisi tersebut.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Husnul Hatimah, "Masa Depan Libya Pasca Moammar Khadaffi", (Universitas Hasanudin, 2015) hal 1

<sup>2</sup> Istilah '*The Arab Spring*' merupakan istilah yang pada tahun 2011 muncul sebagai label untuk mengekspresikan gerakan perlawanan sipil terhadap pemerintah yang terjadi di beberapa Negara Timur Tengah selama tiga tahun terakhir. Ada juga yang menyebutkan dengan istilah *Arab Awakening*. Oxford Islamic Studies, "The Arab Spring (online)", diakses melalui [http://www.oxfordislamicstudies.com.ezproxy.ugm.ac.id/arab\\_spring.html](http://www.oxfordislamicstudies.com.ezproxy.ugm.ac.id/arab_spring.html), pada tanggal 19 Maret 2016

<sup>3</sup> Eman Ragab, "A Formative Stage: Relations Between GCC and North African Countries After The Arab Spring", *Mediterranean Paper*, (Institute Affari Internazionali, 2012 ) hal 9

Pemerintah negara Teluk yakni Arab Saudi, Oman, UEA, Kuwait, dan Qatar mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk menghadapi gelombang potensi ketidakstabilan yang juga dapat membahayakan rezim mereka. Negara-negara Teluk melakukan upaya pencegahan masuknya konflik ke negara mereka seperti, membatasi perpanjangan izin tinggal bagi pekerja Tunisia dan Mesir, dan memimpin beberapa intervensi militer di negara yang mengalami konflik.<sup>4</sup>

Arab Saudi merupakan salah satu dari negara Teluk yang bentuk pemerintahannya monarki dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja. Sehingga, proses demokratisasi akibat fenomena *Arab Spring* menimbulkan kecemasan bagi Pemerintah Arab Saudi di mana nantinya fenomena ini mampu mempengaruhi stabilitas politik di Arab Saudi. Oleh karena itu, Raja Abdullah yang saat itu merupakan Raja Arab Saudi mengambil langkah cepat agar fenomena ini tidak mempengaruhi negaranya salah satunya dengan memberikan bantuan kepada negara yang tengah mengalami transisi politik, seperti Mesir.<sup>5</sup>

Ketika kembali terjadi pergolakan di Mesir dalam penggulingan Presiden Mursi oleh Dewan Militer Mesir, Arab Saudi hadir sebagai negara yang membantu Mesir untuk mengembalikan stabilitas perekonomian Mesir. Bantuan yang diberikan oleh Arab Saudi berupa uang dan minyak. Kedekatan Raja Arab Saudi dan Abdel Fattah al-Sisi yang merupakan Dewan Militer Mesir memudahkan Arab Saudi dalam memberikan bantuannya ke Mesir.<sup>6</sup> Sehingga, pada penelitian ini

---

<sup>4</sup> Eugenio Dacrema, "New Emerging Balances in The Post-Arab Spring: The Muslim Brotherhood and The Gulf Monarchies", *ISPI Analysis No 155 January 2013* (Istituto Per Gli Studi Di Politica Internazionale, 2013) hal 3

<sup>5</sup> Royal Embassy of Saudi Arabia, *History of A Civilization* diakses melalui <http://www.saudiembassy.net>, pada tanggal 17 September 2016

<sup>6</sup> Omar Mawji, "Saudi Arabia Comes to the Rescue of the Egyptian Economy", 2016 diakses melalui

penulis berfokus pada motivasi kebijakan bantuan luar negeri Arab Saudi kepada Mesir pada tahun 2013-2015.

Pergolakan politik di Mesir bermula dari aksi protes rakyat terhadap Presiden Hosni Mubarak yang telah 30 tahun menjabat sebagai Presiden Mesir dengan gaya kepemimpinan yang otoritarian. Aksi protes ini berlangsung selama 18 hari yang dimulai pada 31 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 11 Februari 2011 ditandai dengan mundurnya Presiden Hosni Mubarak. Setelah turunnya Presiden Hosni Mubarak, Mesir mengalami ketidakstabilan dalam bidang ekonominya, sehingga pemerintah sementara Mesir harus mengambil langkah cepat dengan mengadakan pemilu (pemilihan umum) agar sistem di Mesir dapat disusun kembali dengan bentuk pemerintah yang demokratis.<sup>7</sup>

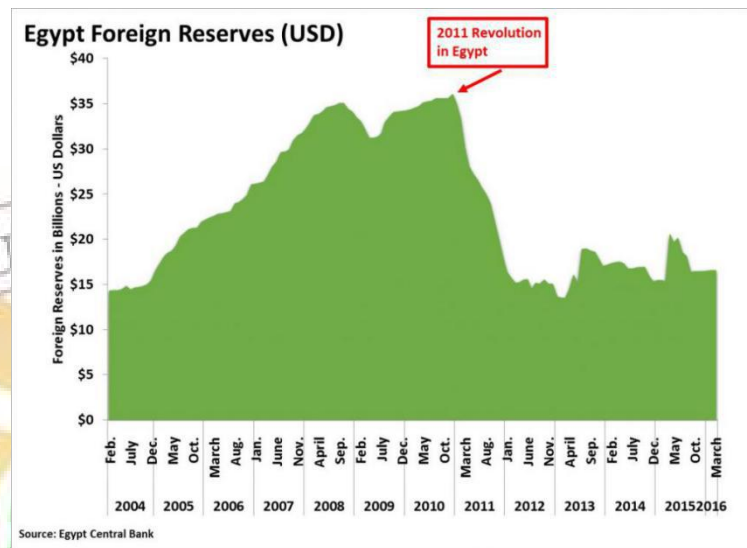
Kemunduran perekonomian Mesir ditandai dengan berkurangnya cadangan devisa negara, turunnya nilai mata uang Mesir terhadap Dollar Amerika Serikat, meningkatnya angka pengangguran, tingginya harga bahan pokok, berkurangnya investor, dan menurunnya pariwisata Mesir karena ketakutan turis pada demonstrasi yang terjadi di Mesir mengakibatkan turunnya GDP (Gross Domestic Product) Mesir, seperti yang ditampilkan grafik 1.1:

---

<https://www.geopoliticalmonitor.com/saudi-arabia-comes-to-the-rescue-of-the-egyptian-economy/> pada tanggal 18 September 2016

<sup>7</sup> David D. Kirkpatrick, "Egypt Erupts in Jubilation as Mubarak Steps Down", 2011 diakses melalui <http://www.nytimes.com/2011/02/12/world/middleeast/12egypt.html> pada tanggal 5 Maret 2016

Grafik 1.1: Kondisi ekonomi Mesir dari tahun 2004-2016



Sumber: *Saudi Arabia Comes to the Rescue of the Egyptian Economy*, <https://www.geopoliticalmonitor.com/saudi-arabia-comes-to-the-rescue-of-the-egyptian-economy/>.

Presiden Mursi berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin, dimana kelompok ini memulai kegiatan sosial dan politiknya dari strata terendah dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan doktrin dari Ikhwanul Muslimin mudah beradaptasi dengan masyarakat kalangan bawah yang merasa sistem otoritarian sebelumnya harus diganti. Masyarakat dengan mudah menerima proses demokrasi karena dianggap akan membawa pengaruh yang lebih baik bagi sistem politik Mesir. Oleh karena itu, Presiden Mursi berhasil memenangkan pemilu pertama yang diadakan secara demokratis di Mesir.<sup>8</sup>

Pada tahun pertama kepemimpinannya, Mesir masih mengalami gejolak di bidang ekonomi dan politik. Gejolak ini ditandai dengan demonstrasi yang terjadi antara pendukung dan oposisi pemerintah masih kerap terjadi. Hal ini dikarenakan banyaknya anggota kelompok Ikhwanul Muslimin yang menduduki

<sup>8</sup> Eugino Dacrema, hal 2

jabatan dalam pemerintahan sehingga memicu rasa ketidaksukaan rakyat pada Ikhwanul Muslimin karena Presiden Mursi dianggap diskriminatif. Pendukung Mursi menyatakan bahwa posisi dalam pemerintahan telah ditawarkan pada kelompok sekuler namun tawaran tersebut ditolak.<sup>9</sup> Selain itu, Presiden Mursi juga mengeluarkan dekrit pada 22 November 2012 yang menyatakan bahwa Mursi memiliki otoritas tertinggi, keputusannya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dekrit ini mendapatkan aksi protes dari kelompok sekuler sehingga ia membatalkan dekritnya pada 8 Desember 2012.<sup>10</sup>

Presiden Mursi dianggap tidak membawa perbaikan terhadap ekonomi dan politik di Mesir. Setelah setahun Presiden Mursi menduduki jabatannya sebagai presiden, ia tidak mampu membangun pertumbuhan ekonomi Mesir. Minimnya investor yang masuk serta naiknya harga pangan menyebabkan bertambah buruknya perekonomian.<sup>11</sup> Pariwisata yang merupakan andalan utama ekonomi Mesir mengalami penurunan sejak terjadinya *Arab Spring*. Mursi melalui kebijakannya telah berupaya untuk memajukan sektor pariwisata Mesir dengan dibukanya akses bagi turis yang berasal dari Iran, setelah terputusnya hubungan diplomatik antara Mesir dan Iran selama 34 tahun. Namun, wisatawan yang ingin berkunjung ke Mesir merasa tidak aman karena hampir setiap hari terjadi

---

<sup>9</sup> Trias Kuncahyono, *Tahrir Square Jantung Revolusi Mesir*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2013) hal 33

<sup>10</sup> Egidius Patnistik, "Kronologi Kejatuhan Muhammad Mursi", 2013, diakses melalui <http://internasional.kompas.com/read/2013/07/04/1104085/Kronologi.Kejatuhan.pada.tanggal.11.Maret.2016>

<sup>11</sup> Rosy Prameswari K, "Keterlibatan Amerika Serikat dalam Penggulingan Muhammad Mursi di Mesir Tahun 2013" (*e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*, 2015) <http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/06/1128.-Rosy-Prameswari-K-1002045123.pdf> hal 2

demonstrasi antara kelompok pendukung dan oposisi pemerintah.<sup>12</sup> Dengan demikian, sektor pariwisata pun tidak mampu memperbaiki keadaan ekonomi Mesir yang memburuk

Penggulingan Presiden Mursi juga disebabkan oleh terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kepemimpinannya. Dalam bidang agama, Mursi akan membawa Mesir menjadi negara Islam, hal ini bertolak belakang dengan keadaan Mesir yang sekuler. Dalam bidang kemanusiaan, saat terjadi pembantaian oleh Polisi Mesir di Port Said yang mengakibatkan 30 orang meninggal, Mursi dinilai tidak menindak tegas pelaku pembantaian tersebut.<sup>13</sup>

Puncak dari krisis politik di Mesir ini yaitu dikeluarkannya ultimatum oleh Dewan Militer Mesir kepada Presiden Mursi untuk mengatasi permasalahan internal di Mesir selama 48 jam atau meninggalkan jabatannya sebagai Presiden Mesir. Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 2013 Dewan Militer Mesir yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Sisi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Angkatan Bersenjata Mesir berhasil menggulingkan Presiden Mursi karena tidak mampu melaksanakan ultimatum yang dikeluarkan.<sup>14</sup>

Kelompok Ikhwanul Muslimin yang merupakan pendukung Presiden Mursi melakukan penolakan terhadap kepemimpinan Militer Presiden Abdel Fattah al-Sisi dengan cara unjuk rasa besar-besaran. Hal ini mengakibatkan militer Mesir menyerang aksi damai jutaan pendukung Presiden Muhammad Mursi, di

---

<sup>12</sup> Dwi Condro Triono, "Mengapa Mursi Gagal Memperbaiki Ekonomi Mesir?", 2013, diakses melalui <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/30/mengapa-mursi-gagal-memperbaiki-ekonomi-mesir/> pada tanggal 15 Maret 2016

<sup>13</sup> Komite Nasional Untuk Kemanusiaan dan Demokrasi Mesir (KNKMD), *Buku Putih Tragedi Kemanusiaan Pasca Kudeta Mesir di Mesir* (Jakarta: KNKMD, 2014) hal 181

<sup>14</sup> Egidius Patnistik, "Kronologi Kejatuhan Muhammad Mursi"

alun-alun Rabi'ah al-Adawiyah Kairo yang menewaskan 55 orang dan 1000 orang lebih luka-luka. Korban semakin banyak berjatuhan sejak militer melancarkan kampanye besar terhadap tersangka militan Islam di Sinai Utara pada September 2013.<sup>15</sup>

Untuk memperbaiki kondisi Mesir, Mursi melakukan kunjungan pertamanya ke Arab Saudi setelah dilantik menjadi Presiden Mesir.<sup>16</sup> Ketika terjadinya kudeta terhadap Presiden Mursi, Arab Saudi memberikan respon yang berbeda. Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja Abdullah mendukung terjadinya kudeta militer di Mesir yang disampaikan melalui media nasional maupun internasional.<sup>17</sup>

Sebelum terjadi gejolak politik di Mesir antara Mursi dan militer Mesir, Amerika Serikat merupakan negara pemberi bantuan terbesar ke Mesir, baik bantuan ekonomi maupun bantuan militer. Sejak terjadinya penggulingan kekuasaan terhadap kepemimpinan demokrasi yang dijalankan oleh Presiden Mursi, Amerika Serikat menghentikan pengiriman bantuan militer dan bantuan tunai senilai 260 juta dollar yang ditujukan untuk pengembangan militer Mesir. Presiden Barrack Obama juga telah meminta militer Mesir untuk kembali menggelar pemilihan umum demi mengembalikan demokrasi Mesir.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Aningtias Jatmika, "Sisi, Tokoh Sentral Mesir Setelah Penggulingan Mursi", 2014, diakses melalui <https://m.tempo.co/read/news/2014/06/04/119582418/sisi-tokoh-sentral-mesir-setelah-penggulingan-mursi> pada tanggal 12 Maret 2016

<sup>16</sup> Bradley Hope, "Egypt Morsi to Visit Saudi Arabia in Bid for Aid", 2012, diakses melalui <http://www.thenational.ae/news/world/egypts-morsi-to-visit-saudi-arabia-in-bid-for-aid> pada tanggal 14 Maret 2016

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> "Amerika Bekukan Bantuan Militer ke Mesir", 10 Oktober 2013 diakses melalui <http://www.dw.com/id/amerika-bekukan-bantuan-militer-ke-mesir/a-17149001> pada tanggal 15 Maret 2016

Arab Saudi dan Amerika Serikat memiliki pandangan berbeda dalam melihat transisi politik Mesir. Amerika Serikat yang mendukung penggulingan Presiden Mubarak menginginkan Mesir menjadi negara yang demokratis, sementara Arab Saudi yang memiliki sistem pemerintahan monarki mendukung penggulingan terhadap pemerintahan demokrasi di Mesir.

Sebelum terjadinya penghentian bantuan oleh Amerika Serikat, Arab Saudi melalui Menteri Luar Negerinya telah menyatakan “Kepada siapapun yang mengumumkan bahwa mereka akan memotong bantuannya ke Mesir atau mengancam akan melakukannya, ketahuilah bahwa Arab dan bangsa-bangsa muslim kaya raya dan tidak ragu memberi bantuan kepada Mesir.” Menurut Menteri Luar Negeri Arab Saudi, saat ini Mesir tengah berperang melawan terorisme.<sup>19</sup>

Raja Arab Saudi mendukung kudeta Mesir sebagai bentuk perlawanan terhadap terorisme. Raja Abdullah dalam pernyataan resminya pada media menyatakan bahwa “Kerajaan Arab Saudi, rakyat dan pemerintahnya berdiri hari ini dengan saudara dari Mesir untuk melawan aksi terorisme.”<sup>20</sup> Kelompok Ikhwanul Muslimin disebut Raja Abdullah sebagai kelompok teroris yang harus diperangi. Raja Abdullah mendukung kepemimpinan militer Mesir yang dipegang oleh Jenderal Abdel Fattah al-Sissi.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Choirul, “Arab Saudi Siap Gelontorkan Bantuan ke Mesir”, 20 Agustus 2013 diakses melalui <http://dunia.tempo.co/read/news/2013/08/20/115505740/arab-saudi-siap-gelontorkan-bantuan-ke-mesir> pada tanggal 15 Maret 2016

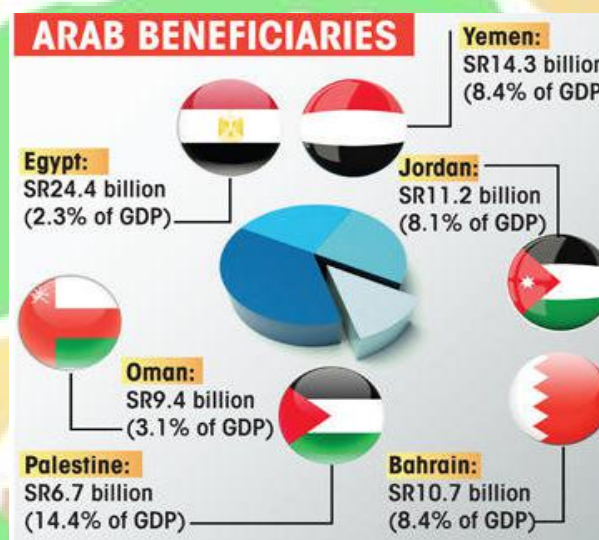
<sup>20</sup> Mustapha Ajbaili, “Saudi: Muslim Brotherhood a Terrorist Group”, (Al Arabiya, Maret 2014) diakses melalui <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2014/03/07/Saudi-Arabia-declares-Muslim-Brotherhood-terrorist-group.html> pada tanggal 14 Maret 2016

<sup>21</sup> Ibid



Setelah Presiden Mursi turun dari jabatannya, Hakim Agung Mahkamah Konstitusi Mesir Adly Mansour maju sebagai Presiden Sementara Mesir. Pemerintahan Adly Mansour hanya berlangsung satu tahun. al-Sisi menggantikan posisi Adly Mansour yang ia tunjuk untuk menjadi presiden sementara di Mesir. Pengangkatan al-Sisi tahun 2014 ini ditandai dengan kemenangannya sebanyak 97 persen suara.<sup>22</sup>

Gambar 1.1 Mesir menerima bantuan terbanyak dari Arab Saudi



Sumber: Egypt, Yemen are Top Recipients of Saudi Aid, (<http://www.arabnews.com/news/748966>)

Arab Saudi telah memberikan bantuan untuk mendukung ekonomi Mesir yang mengalami penurunan, terhitung sejak enam hari setelah penggulingan Presiden Mursi.<sup>23</sup> Bantuan disalurkan oleh Pemerintah Arab Saudi ke Bank Sentral Mesir. Bantuan ini diberikan dalam bentuk uang dan produk minyak dan gas.

<sup>22</sup> Amar Abdallah Daish, "Abdel Fattah al-Sisi Resmi Dilantik Jadi Presiden Mesir", diakses melalui (<http://news.detik.com/internasional/2602443/abdel-fatah-al-sisi-resmi-dilantik-jadi-presiden-mesir>) pada tanggal 5 Oktober 2016

<sup>23</sup> Dewi Mardiani, "Saudi Beri Bantuan 5 Miliar Dolar AS", 10 Juli 2013 diakses melalui <http://internasional.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/07/10/mpoz8v-saudi-beri-bantuan-5-miliar-dolar-as-ke-mesir> pada tanggal 15 Maret 2016

## 1.2 Rumusan Masalah

Transisi politik di Timur Tengah akibat arus demokratisasi yang dibawa oleh *Arab Spring* memberikan dampak berbeda terhadap negara Teluk, salah satunya Arab Saudi. Arab Saudi merupakan salah satu dari Negara Teluk yang masih menganut sistem monarki hingga saat ini. Sehingga, ketika terjadi penggulingan kekuasaan Mursi di Mesir yang memiliki aliran demoktaris dan berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin oleh Dewan Militer Mesir, Arab Saudi muncul secara agresif sebagai negara yang memberikan dukungan terhadap aksi tersebut dengan memberikan bantuan kepada Mesir walaupun negara lain mengecam aksi penggulingan ini. Arab Saudi telah memberikan bantuan ekonomi kepada Mesir sejak enam hari turunnya Presiden Mursi dari kekuasaannya.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas pertanyaan penelitian yang ingin diteliti yaitu: *“Mengapa Arab Saudi memberikan bantuan ekonomi kepada Mesir tahun 2011-2015?”*

## 1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motivasi kebijakan bantuan luar negeri Arab Saudi kepada Mesir tahun 2011-2015.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis: Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penstudi Hubungan Internasional yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai motivasi Arab Saudi dalam memberikan bantuan ekonomi kepada Mesir.

2. Aspek Praksis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bahwa bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor memiliki motivasi dalam mencapai kepentingan negara donor.

### 1.6 Studi Pustaka

Pada penelitian ini, penulis memiliki beberapa tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang dianggap relevan untuk dijadikan landasan penelitian.

*Pertama*, penulis menggunakan tulisan dari Espen Villager yang berjudul “*Arab Foreign Aid: Disbursement Patterns, Aid Policies and Motives*”. Dalam tulisan ini, Espen Villager menjelaskan bantuan dari negara-negara donor utama Arab yakni Arab Saudi, Kuwait dan Uni Emirat Arab yang berfokus pada pola dan kebijakan pemberian bantuan. Ada tiga alasan pemberian bantuan oleh Negara Arab. Pertama, negara-negara Arab telah menjadi donor utama bantuan asing dan Arab Saudi tetap menjadi salah satu donor bilateral terbesar tunggal di dunia. Kedua, ada beberapa indikator yang menunjukkan bantuan Arab digunakan untuk tujuan strategis dan motif agama. Ketiga, bantuan Arab digunakan khususnya untuk mempromosikan Islam dan membangun solidaritas Arab.<sup>24</sup>

Bantuan Arab digunakan untuk menghargai sekutu dalam konflik militer atau dalam membangun aliansi strategis. Arab telah membangun aliansi dengan memberikan bantuan ke negara-negara yang membantu kepentingan strategis Arab. Invasi Irak ke Kuwait pada Agustus 1990 memicu empat kali lipat bantuan dari Arab dan dalam jumlah besar ke negara-negara yang mendukung pembebasan negara. Sebagai respon terhadap kurangnya dukungan, Majelis Nasional Kuwait

---

<sup>24</sup> Espen Villager, “Arab Foreign Aid: Disbursements, Patterns, Aid Policies, and Motives,” (Bergen: CMI Report, 2007) hal 1-2

memutuskan pada tahun 1992 untuk menolak pemberian bantuan kepada negara-negara yang mendukung invasi Irak. Arab Saudi mengikuti hal yang sama, setelah perang, Mesir, Turki dan Maroko (semua pendukung perang melawan Irak) menjadi tiga penerima bantuan utama dari Arab Saudi.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini dilakukan pada tahun 1985-2004. Motif yang digunakan dalam pemberian bantuannya yakni untuk mempromosikan Islam. Pada penelitian yang ingin penulis teliti, Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok Islam yang keberadaannya tidak didukung oleh Arab Saudi yang merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan ideologi antara Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin. Pemegang kekuasaan tertinggi di Arab Saudi adalah raja sehingga, perintah turun langsung dari raja. Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin, kelompok ini menganut aliran demokratis dan aturan-aturan berasal dari aspirasi masyarakat.

*Kedua*, penulis menggunakan hasil penelitian dari Febrian Ali dan Pazli yang berjudul “Dukungan Arab Saudi Terhadap Rezim Pemerintahan Hamad Bin Isa Al-Khalifa Di Bahrain Pada Tahun 2011-2014”. Fenomena Arab Spring atau wacana demokrasi Barat yang mengalihkan sistem pemerintahan monarki konstitusional ke sistem demokrasi hanya mampu menurunkan Perdana Menteri Tunisia, Zine El Abidin Ben Ali, Hosni Mubarak, Muammar Al-Ghaddafi tetapi tidak dengan rezim Hamad bin Isa Al Khalifa di Bahrain. Hamad bin Isa Al-Khalifa masih tetap menjadi pemimpin setelah banyaknya demonstrasi besar-besaran, aksi boikot serta dapat melancarkan pemilu legislatif pada 22

---

<sup>25</sup> Ibid hal 12-19

November 2014 dengan dikawal ketat oleh sekutu Barat dan pasukan keamanan negara-negara tetangga, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).<sup>26</sup>

Arab Saudi adalah negara yang paling dominan mendukung rezim pemerintahan Bahrain, pada tanggal 20 Februari 2011 Wakil Perdana Menteri II Arab Saudi, Pangeran Nayef bin Abdulaziz, menyempatkan panggilan telepon kepada Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa untuk membahas hubungan bilateral. Pangeran Nayef menekankan bahwa Arab Saudi berdiri dengan Bahrain dan mendesak rakyat negara itu untuk menjaga keamanan mereka, stabilitas dan persatuan nasional.

Dukungan Arab Saudi meminimalisir konflik Bahrain melalui bantuan keamanan, ekonomi dan penyelesaian konflik dan krisis politik Bahrain bertujuan untuk mengurangi dominasi dan ancaman Iran di Bahrain serta ancaman terhadap aset-aset diplomatik dan perdagangan dan keamanan warga negara Arab Saudi di Bahrain yang mengarah pada kepentingan geopolitik.<sup>27</sup> Penelitian ini penulis gunakan untuk melihat sikap Arab Saudi dalam mempersempit dominasi Iran di kawasan Timur Tengah.

*Ketiga*, penulis menggunakan penelitian dari Arif Wicaksa dan M. Saeri yang berjudul “Strategi Arab Saudi Terhadap Stabilitas Pemerintahannya Tahun 2011-2013”. Jurnal ini menjelaskan dampak dari peristiwa revolusi yang terjadi di Timur Tengah terhadap stabilitas pemerintahan Arab Saudi serta kemampuan Arab

---

<sup>26</sup> Febrian Ali dan Pazli, “Dukungan Arab Saudi Terhadap Rezim Pemerintahan Hamad Bin Isa Al-Khalifa Di Bahrain Pada Tahun 2011-2014”, *Jurnal Transnasional*, Vol. 7, No. 1, Juli 2015 (Universitas Riau, 2015) hal 1772

<sup>27</sup> Ibid 1777 - 1789

Saudi dalam mempertahankan stabilitas pemerintahannya ditengah arus revolusi Timur Tengah yang melanda kawasannya.

Arab Saudi yang juga berada di kawasan Timur Tengah tidak dapat terlepas dari dampak revolusi yang terjadi di Timur Tengah. Arab Saudi juga memiliki faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya revolusi sebagaimana negara Timur Tengah lainnya yang telah hancur stabilitas pemerintahannya bahkan pemerintahannya ditumbangkan. Arab Saudi memiliki dua faktor utama yang dapat memicu terjadinya revolusi. Faktor-faktornya adalah isu demokratisasi Arab Saudi dan konflik Sunni-Syi'ah. Arab Saudi adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam (Sunni). Arab Saudi merupakan negara Islam yang mengambil pokok ajaran Islam yakni Al Qur'an dan Sunnah menjadi konstitusi negaranya.<sup>28</sup>

Pemerintah Arab Saudi mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul akibat revolusi Timur Tengah, dan pemerintah Arab Saudi telah mampu mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi faktor pemicu revolusi sehingga faktor tersebut tidak berkembang dan menjadi permasalahan yang dapat menghancurkan stabilitas pemerintahan Arab Saudi.<sup>29</sup> Penelitian ini penulis gunakan untuk melihat upaya yang dilakukan Arab Saudi dalam mempertahankan stabilitas pemerintahannya.

*Keempat*, penulis menggunakan hasil penelitian dari Ismail Kurun yang berjudul *“Democratisation in Egypt From A Historical Perspective: Problems,*

---

<sup>28</sup> Arif Wicaksa dan M. Saeri, *Strategi Arab Saudi Terhadap Stabilitas Pemerintahannya Tahun 2011-2013*, JOM FISIP Volume 2 No. 1 Februari 2015. (Universitas Riau, 2015)

<sup>29</sup> Ibid hal 10

*Pitfalls and Prospects*”. Jurnal ini menjelaskan mengenai proses demokratisasi di Mesir setelah Mesir mendeklarasikan diri sebagai negara republik. Dimulai dari Presiden Nasser yang memimpin secara sosialis, dimana Nasser melakukan reformasi di segala bidang, yakni melalui reformasi daratan, program pelayanan sosial besar-besaran, subsidi, dan nasionalisasi industri. Nasser mendapat dukungan publik yang luas, namun sistem pemerintahannya tidak berlangsung lama. Tingkat kesejahteraan negara berkurang dan terisolasi dari ekonomi global. Pemerintah dipaksa untuk memotong kembali subsidi dan menghapus beberapa layanan sosial, yang mengarah pada krisis dalam masyarakat Mesir.<sup>30</sup>

Demokratisasi di Mesir dimulai dengan naiknya Presiden Anwar al-Sadat menggantikan Gamal Abdel Nasser yang meninggal pada tahun 1970. Presiden Sadat membawa perubahan besar dalam prospek dan struktur ekonomi Mesir. Pemerintahan Sadat berakhir karena dibunuh oleh militan Islam dalam sebuah upacara militer pada tahun 1981 dan Hosni Mubarak segera menggantikan kepemimpinannya. Presiden Mubarak melanjutkan kebijakan infitah Presiden Sadat dan rezimnya dikenal sebagai otoritarianisme merakyat di tahun 1980 dan awal 1990-an. Pemerintahan Mubarak berakhir ketika terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan masyarakat Mesir untuk menurunkan Presiden Mubarak. Setelah Presiden Mubarak turun, Mesir mengadakan pemilu pertama dan Muhammad Mursi berhasil terpilih menjadi Presiden Mesir.<sup>31</sup>

*Kelima*, penulis menggunakan tulisan dari Abdel Monem Said Aly yang berjudul *“Deciphering Abdel Fattah el-Sisi: President of Egypt’s Third Republic”*.

---

<sup>30</sup> Ismail Kurun, *“Democratisation in Egypt From A Historical Perspective: Problems, Pitfalls and Prospects,”* Menegement and Economic Vol 22 Ed 1, 2015 hal 184

<sup>31</sup> Ibid hal 184-190

Jurnal ini menjelaskan mengenai kepemimpinan Presiden Abdel Fattah al-Sisi di Mesir. Untuk mengatasi tantangan langsung Mesir, al-Sisi tampaknya telah merumuskan beberapa rencana aksi yang rinci, yakni:<sup>32</sup>

1. Tingginya pengangguran akibat revolusi yang terjadi di Mesir tahun 2011 menjadi tantangan awal bagi al-Sisi untuk menstabilkan ekonomi Mesir.

2. Berkurangnya investasi akibat ketidakstabilan politik Mesir menyebabkan Sisi harus menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, terutama Negara Teluk karena Negara Teluk merupakan investor terbesar dan pemberi bantuan bagi Mesir.

3. Al-Sisi mulai mengelola Sungai Nil sebagai promosi investasi, penggalangan dana, dan penyediaan layanan.

4. Prioritas al-Sisi adalah pembangunan ekonomi Mesir. Penekanannya pada kebutuhan untuk membuat Mesir menjadi sebuah "republik hukum" karena itu didasarkan pada asumsi bahwa ini diperlukan guna mempercepat proses pembangunan. Dalam kerangka ini, sebuah revolusi legislatif diperlukan untuk membuat undang-undang Mesir yang konsisten dan kompatibel dengan prinsip-prinsip konstitusi yang melindungi hak-hak politik dan sosial ekonomi serta hak asasi manusia.

Posisi penelitian ini dibandingkan dengan kajian sebelumnya adalah untuk melihat alasan Arab Saudi sebagai negara dalam memberikan bantuan luar negeri terhadap Mesir yang sedang dipimpin oleh Pemerintahan Militer, di mana

---

<sup>32</sup> Abdel Monem Said Aly, "Deciphering Abdel Fattah el-Sisi: President of Egypt's Third Republic" (*Middle East Brief* 82, July 2014)



Pemerintahan Militer Mesir berhasil menumbangkan pemerintahan Mesir yang demokratis.

## 1.7 Kerangka Konseptual

### 1.7.1 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang sering digunakan dalam interaksi internasional. Hal ini merupakan etika moral dalam membuat kebijakan luar negeri yang harus mengedepankan unsur rasional dalam mengimplementasikan sebuah keputusan pemberian bantuan luar negeri.<sup>33</sup> Secara umum, bantuan luar negeri merupakan transfer sumber daya yang berupa dana, barang dan jasa dari satu pemerintah ke pemerintah lain. Dalam arti sempit, menurut Rober Gilpin, dalam bukunya *“The Political Economy of International Relations”* bantuan luar negeri merupakan sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif maju kepada negara yang tingkat ekonominya lebih rendah.<sup>34</sup> Dalam arti luas, menurut K.J Holsti bantuan luar negeri merupakan transfer uang, barang, teknologi dan nasihat teknis dari negara donor ke negara penerima.<sup>35</sup>

Menurut Todaro, keputusan untuk mengeluarkan bantuan luar negeri tidak terlepas dari perumusan kebijakan luar negeri negara donor, “... hampir semua pemberian bantuan luar negeri yang bersifat bilateral ditentukan atas dasar pertimbangan politik dan militer dari negara donor atau penilaian khusus dari

<sup>33</sup> Mark R. Amstutz, *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*, (Brown and Bechmark, 1995) hal 146

<sup>34</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, (New Jersey: Princeton University Press. 1987) hal 311

<sup>35</sup> K.J Holsti, *International Politics A Framework for Analysis 6<sup>th</sup> Edition*, (New Jersey: Prentice-Hall.Inc) hal 192

pembuat keputusan di negara donor. Hal ini merupakan faktor yang sulit untuk diramalkan.”<sup>36</sup>

Lancaster membagi tujuan bantuan internasional ke dalam empat tujuan utama yakni tujuan diplomatik, tujuan pembangunan, tujuan bantuan kemanusiaan, dan tujuan komersial. Tujuan kebudayaan juga ada, namun tidak terlalu signifikan. Pada proses pelaksanaannya, sebagian besar bantuan luar negeri diberikan secara bilateral langsung dari satu negara ke negara lain. Para donor juga dapat memberikan bantuan secara tidak langsung sebagai bantuan multilateral, di mana sumber dayanya berasal dari beberapa donor. Bantuan luar negeri bilateral cenderung diyakini memiliki ikatan politik yang lebih kuat dari pada bantuan luar negeri multilateral, karena sifat bantuan luar negeri bilateral lebih sensitif terhadap kondisi politik domestik.<sup>37</sup>

Bantuan luar negeri adalah sebuah konsep yang rumit. Bantuan luar negeri terkadang dilihat sebagai kebijakan suatu negara, namun bukan hanya sebuah kebijakan melainkan alat dari kebijakan itu sendiri.<sup>38</sup> Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan oleh suatu negara bukanlah tanpa adanya kepentingan dari negara donor, meskipun bantuan tersebut tidak harus dikembalikan oleh negara penerima. Kepentingan negara donor tidak hanya dalam meliputi permasalahan ekonomi, namun juga masalah politik. Sehingga, motif yang melatarbelakangi pemberian bantuan luar negeri menjadi hal yang menarik untuk diteliti.

---

<sup>36</sup> Michael P, Todaro, *Economic Development 4<sup>th</sup> Edition*, (UK: Addison Wesley Longman. 1989) hal 591-597

<sup>37</sup> Carol Lancaster, *Foreign Aid: Diplomacy, Development, Domestic Politics*, (Chicago: The University of Chicago Press, 2007), hal 9

<sup>38</sup> Ibid

### 1.7.1.1 Motif Bantuan Luar Negeri

Menurut pandangan negara donor, bantuan luar negeri adalah instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan untuk melakukan hubungan politik dan diplomatik dengan negara lain, meningkatkan stabilitas negara yang strategis, serta melakukan ekspansi terhadap pasar ekspor.<sup>39</sup>

Berbagai motif tersebut menjadi basis untuk menjelaskan pola alokasi dan distribusi bantuan luar negeri. Selain itu, motif-motif ini seringkali tidak berdiri sendiri, karena dalam suatu kebijakan, alasan-alasan tersebut dapat saling tumpang tindih. Para pemimpin negara pemberi bantuan luar negeri telah membenarkan pengeluaran negara dalam hal pemberian bantuan bertujuan untuk melayani kepentingan nasional negara donor.

Bantuan bertujuan untuk membantu, mendukung orang lain yang membutuhkan, dan ini menunjukkan kemurahan hati dari negara donor. Tetapi altruisme bukanlah motivasi utama dari program bantuan luar negeri pemerintah. Bantuan selalu dimaksudkan untuk melayani kepentingan nasional, walaupun kebutuhan dan kepentingan pihak penerima belum terpenuhi.<sup>40</sup>

Dalam kaitan antar motif yang mengiringi pemberian bantuan luar negeri menurut Finn Tarp dan Sherman Robinson dalam rangkumannya pada buku

<sup>39</sup> Picard, L.A. et al, "Foreign Aid and Foreign Policy : Lessons for the Next Half Century", (New York: M.E Sharpe, 2008) hal 7

<sup>40</sup> Asra Virgianita dkk, *Perkembangan Diskursus dan Implementasi Bantuan Luar Negeri Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Sempu, 2014)

Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions for the Future terdapat beberapa motif donor dalam menyalurkan bantuan luar negeri yaitu:<sup>41</sup>

### 1. Altruisme

Altruisme atau motif moral dan kemanusiaan dalam pemberian bantuan luar negeri adalah gagasan bahwa orang yang baik memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang yang miskin dan yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya. Sehingga, kewajiban moral yang sama juga berlaku untuk hubungan antara negara-negara kaya dan miskin.

Dalam debat bantuan luar negeri, bantuan yang diberikan murni untuk moral dan kemanusiaan itu jarang terjadi. Biasanya motivasi ini dikombinasikan dengan beberapa bentuk kepentingan dari negara donor. Selain itu, menurut Carl-Magnus Forsud bahwa bantuan disumbangkan karena adanya kewajiban moral untuk mencapai tujuan seperti pemberantasan kemiskinan, memperbaiki kesehatan masyarakat di negara lain dan memperbaiki hak asasi manusia dan demokrasi.<sup>42</sup>

### 2. Ideologi Politik, Sasaran Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Komersial

Bantuan luar negeri diberikan sebagai bentuk suap atau propaganda untuk mempromosikan sistem politik agar negara penerima mengikuti sistem yang dipromosikan oleh negara donor. Negara donor juga mengejar berbagai kebijakan luar negeri dan kepentingan sektor komersial dan swasta dalam negeri dalam

<sup>41</sup> Finn Tarp(edt), *Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions For The Future*, (London: Routledge, 2000) hal 2

<sup>42</sup> Carl-Magnus Forsud, "The Motives of Aid Donors – A comparative study of the aid allocation of Denmark", Institutionen för samhällsvetenskap, 2009 hal 14

penyediaan bantuan. Pada level regional bantuan ini digunakan untuk membentuk kepentingan aliansi dan perjanjian regional serta berfokus untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan internasional. Pada bagian kepentingan komersial, negara penerima bantuan akan menjadi mitra dagang negara donor agar bantuan yang diberikan negara donor digunakan untuk membeli produk ekspor dari negara donor, hal ini dapat bertindak sebagai strategi promosi ekspor untuk negara maju. Manfaat potensial bagi negara donor mencakup manfaat jangka panjang dan pendapatan riil yang lebih besar untuk faktor-faktor yang digunakan secara intensif dalam barang ekspor.<sup>43</sup>

### 3. Pembangunan Ekonomi

Motif ini digunakan untuk merealisasikan pembangunan di negara penerima bantuan. Selain itu, ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh motif ini, yakni untuk menyebarkan demokrasi, isu gender, dan ekspansi pasar (termasuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi investasi asing).

Bantuan luar negeri secara tidak langsung dapat mendorong terjadinya demokrasi di negara penerima bantuan, dengan cara mengubah beberapa kondisi struktural yang menjadi prasyarat untuk transisi atau kelangsungan rezim.<sup>44</sup> Sebagai kategori analisis, perbedaan gender dilihat sebagai intervensi kebijakan yang dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, makanan, dan rekreasi intra-rumah tangga.<sup>45</sup> Ekspansi pasar sebagai bentuk perluasan pasar negara donor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara penerima bantuan.

<sup>43</sup> Javed Younas, "Motivation for Bilateral Aid Allocation: Altruism or Trade Benefits." *European Journal of Political Economy*, September 2008, hal 661

<sup>44</sup> Steven E Finkel, Pérez-Liñán, Aníbal S. and Seligson, Mitchell A, "The Effects of U.S. Foreign Assistance on Democracy Building, 1990-2003," *World Politics*, April 2007, 59(3) hal 410

<sup>45</sup> Lisa Racey, "Gender Equality and Foreign Aid," dalam *Foreign Aid and Development: Lessons Learnt and Directions For The Future*, (London: Routledge, 2000) hal 248

Merujuk pada bantuan yang diberikan Arab Saudi ke Mesir yang berfokus pada isu demokratisasi yang tengah terjadi di Mesir agar arus demokrasi tersebut tidak menyebar dan mempengaruhi ideologi Arab Saudi, hal ini menjadi indikator dalam pemilihan motif ideologi politik, kebijakan luar negeri dan kepentingan komersil yang mengiringi pemberian bantuan luar negeri oleh Arab Saudi.

### **1.8 Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau variabel melalui penggunaan teori dan konsep-konsep dalam menjelaskan suatu fenomena.<sup>46</sup> Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai motivasi Arab Saudi dalam memberikan bantuan ekonomi kepada Pemerintahan Dewan Militer Mesir.

#### **1.8.1 Batasan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada tahun 2011 sejak terjadinya *Arab Spring* di Mesir ditandai dengan masuknya gelombang demokrasi ke Mesir hingga tahun 2015 yang menjadi akhir kepemimpinan Raja Abdullah di Arab Saudi. Hal ini dikarenakan, di kepemimpinan Raja Salman, Arab Saudi mulai membangun hubungan baik dengan kelompok Ikhwanul Muslimin.

#### **1.8.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah eksplanatif, yaitu untuk menjelaskan terjadinya suatu fenomena atau isu dalam hubungan internasional.

---

<sup>46</sup> Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi* (Pusat Antar Universitas– Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES: Yogyakarta, 1990), 261-286.

Fenomena yang ingin peneliti teliti ialah pemberian bantuan luar negeri oleh Arab Saudi untuk mendukung pemerintahan baru di Mesir setelah kudeta Presiden Muhammad Mursi.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa**

Unit analisis merupakan objek kajian yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis. Unit yang dapat mempengaruhi perilaku unit analisa disebut sebagai unit eksplanasi. Unit eksplanasi lebih dahulu terjadi daripada unit analisis.<sup>47</sup> Tingkat analisis merupakan area dimana unit-unit yang akan dijelaskan berada. Tingkat analisis dalam studi hubungan internasional membantu di tingkat mana analisis dalam penelitian ini akan ditekankan.<sup>48</sup>

Unit analisa pada penelitian ini adalah Arab Saudi sebagai negara, karena perilaku Arab Saudi yang memberikan bantuan ekonomi, dan unit eksplanasi dari penelitian ini adalah Pemerintah Mesir karena bantuan Arab Saudi ditujukan kepada pemerintah Mesir. Tingkat analisa pada penelitian ini adalah pada level negara karena penelitian ini berfokus pada Arab Saudi dan Mesir.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui buku-buku, jurnal, dokumen, majalah dan artikel-artikel, media elektronik serta

---

<sup>47</sup> Ibid hal 108

<sup>48</sup> Ibid., 35.

pencarian informasi melalui internet.<sup>49</sup> Dalam penulisan ini penulis akan memilih kembali sumber-sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian ini.

### **1.8.5 Teknik Analisa Data**

Tahap awal yang peneliti lakukan dalam proses analisa data ialah menyeleksi dan mengumpulkan data terkait persoalan yang diangkat dalam penelitian, kemudian melakukan pengolahan data dan mengelompokan data tersebut dengan menggunakan kerangka analisa motivasi negara dalam memberikan bantuan luar negeri dalam menjawab permasalahan atau objek penelitian. Untuk memudahkan penulis melakukan pengolahan data, maka penulis mencoba mengelompokan data-data sekunder yang diperoleh melalui tulisan-tulisan terkait baik itu dari surat kabar, majalah, dan dalam bentuk dokumen lainnya. Dalam melakukan analisa terhadap motif, penting untuk mengamati sikap aktor yang akan diperiksa. Pernyataan mereka dalam pidato, artikel dan materi dalam setiap interaksi diplomatis yang dipublikasikan menjadi dasar analisis untuk menentukan motif apa yang mendasari negara memberikan bantuan luar negeri.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Pendahuluan

Bab yang berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, pembatasan masalah dan

---

<sup>49</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hal 156.



sistematika penulisan. Menggambarkan secara keseluruhan tentang penelitian yang akan dilakukan.

**BAB II : Dinamika Politik Timur Tengah dan Pengaruhnya Terhadap Orientasi Kebijakan Arab Saudi.**

Bab ini menjelaskan mengenai awal mula berdirinya Kerajaan Arab Saudi serta pertarungan sektarian Islam di Timur Tengah dan dinamika politis negara di Timur Tengah yang mempengaruhi orientasi kebijakan Arab Saudi.

**BAB III : Pemerintahan Dewan Militer Mesir dan Bantuan Arab Saudi.**

Bab ini menjelaskan pengaruh dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah terhadap Mesir serta hubungan antara Arab Saudi dan Mesir di bawah Pemerintahan Militer Mesir dan menjelaskan bantuan luar negeri Arab Saudi ke Mesir.

**BAB IV : Motif Arab Saudi dalam Memberikan Bantuan kepada Mesir.**

Bab ini menjelaskan hasil analisa dari motif pemberian bantuan luar negeri Arab Saudi ke Mesir.

**BAB V : Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

